

STRATEGI PRANCIS MENGHADAPI ANCAMAN PERTAHANAN KEAMANAN DI PASIFIK (STUDI KASUS KONTRA INSURJENSI DI KALEDONIA BARU)

FRANCE'S STRATEGY TO FACE DEFENSE AND SECURITY THREAT IN PACIFIC (STUDY CASE OF COUNTERINSURGENCY IN NEW CALEDONIA)

Windu Wahyu Wijaya¹, Moch. Afifuddin², Triyoga Budi Prasetyo³

UNIVERSITAS PERTAHANAN

(karlanbinsukarja@gmail.com, afifpnb@yahoo.co.id, tri_yoga_budi@yahoo.co.id)

Abstrak - Untuk dapat memahami tentang strategi kontra insurjensi Prancis di Kaledonia Baru diperlukan pemahaman akan lingkungan strategis regional di Pasifik. Hal itu dikarenakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan suatu gerakan insurjensi adalah ada tidaknya dukungan dari negara-negara luar atau organisasi internasional. Oleh karena itu, fenomena meningkatnya kehadiran dan pengaruh China di Pasifik dapat dipersepsikan oleh Prancis sebagai ancaman karena China adalah kiblat gerakan insurjensi seluruh dunia. Penelitian tentang meningkatnya kehadiran dan pengaruh China di Pasifik serta strategi kontra insurjensi Prancis di Kaledonia Baru dilakukan menggunakan metode penelitian kualitatif. Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, peneliti menggunakan desain penelitian studi kasus. Hasil penelitian yang diperoleh ternyata Prancis tidak menganggap China sebagai ancaman dan menerapkan strategi pertahanan keamanan dengan membangun kekuatan kooperatif, yaitu membangun kekuatan bersama, bukan kekuatan atas kekuatan lain yang ada di Pasifik seperti China. Kebijakan strategi pertahanan keamanan Prancis tersebut diambil karena China sebagai aktor di kawasan dapat diajak bekerjasama menjaga keamanan dan stabilitas perdamaian di Pasifik yang sangat luas dan mengandung permasalahan yang kompleks. Tetapi, Prancis menyadari perlu selalu mengawasi dan memperingatkan China agar mengikuti aturan hukum internasional. Hasil penelitian terkait strategi kontra insurjensi Prancis di Kaledonia Baru, diketahui Prancis lebih fokus melakukan pembangunan ekonomi dan mengakui identitas Kanak. Sekarang Suku Kanak hidup lebih sejahtera daripada sebelumnya. Sehingga, diprediksi hasil referendum tahun 2020 dan 2022 nanti, mayoritas penduduk Kaledonia Baru akan memilih tetap bersama Prancis.

Kata Kunci: Ancaman, insurjensi, kontra insurjensi, referendum, strategi.

Abstract - In order to understand France's counter-insurgency strategy, it takes an understanding of the development of the strategic environment in the Pacific. Because one of the key factors which determine the successfulness of any insurgency movement is whether there is or not any supports from foreign countries or international organizations. That is why, the phenomena of growing chinese's presence and influence in the Pacific may be perceived as defense security threat by France because China is a role model of all insurgency movements around the world. The research on the increasing chinese's role in the Pacific and on France's counter-insurgency strategy is performed by using a qualitative research method. To obtain the data needed, The researcher used studies case's research design. The result of the research revealed that France does not consider China as a defense security threat, instead, France applied defense security strategy to build cooperative power, that is, to build "power with," not "power over" another powers in Pasific such as China. France has been

¹ Program Studi Peperangan Asimetris, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan

² Program Studi Peperangan Asimetris, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan

³ Program Studi Peperangan Asimetris, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan

taken this policy because China is a regional actor which can be invited to cooperate to maintain security and peace in the vast area of the Pacific which contains complicated problems. But, France realizes the need to keep on watching and reminding China to obey international rules. The result of the research concerning France's counter-insurgency strategy in New Caledonia, revealed that France pays more attention to the economic development and the acknowledgement of Kanak's identity. Now that Kanak live more prosperous than before, it is predicted that the result of the referendum on self-determination in 2020 and 2022, the majority still want New Caledonia always be with France.

Keywords: threat, insurgency, counter-insurgency, referendum, strategy.

Pendahuluan

Mengacu kepada Konstitusi Prancis yang disahkan pada tanggal 4 Oktober 1958 dan menjadi dasar berdirinya Republik Kelima Prancis, dinyatakan bahwa Prancis sebagai *Republique Indivisible* atau Republik Kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Tetapi, sejak tahun 1878 hingga saat ini, Suku Kanak terus melakukan gerakan insurjensi yang bertujuan agar Kaledonia Baru merdeka dari Prancis. Sehingga insurjensi Suku Kanak mengancam integritas wilayah kedaulatan Prancis di Pasifik.

Setiap gerakan insurjensi pasti membutuhkan dukungan negara-negara luar atau organisasi internasional.⁴ Contohnya adalah gerakan insurjensi OPM di Papua Indonesia yang selalu berupaya agar PBB datang ke Papua. Sehingga, untuk memahami insurjensi Suku Kanak di Kaledonia Baru pun, diperlukan pemahaman tentang

bagaimana perkembangan lingkungan strategis di Pasifik. Untuk mengetahui ada tidaknya negara-negara di Kawasan Pasifik yang memberikan dukungan kepada insurjen Suku Kanak di Kaledonia Baru. Tetapi, mayoritas negara-negara di Pasifik merupakan negara-negara kecil yang lemah dari aspek kemampuan ekonomi dan militer. Negara-negara di Pasifik tengah dihantui jebakan *debt traps* oleh China yang memberikan bantuan dana dalam jumlah besar. Sehingga fenomena di Kawasan Pasifik yang relevan dengan konteks insurjensi Suku Kanak ini adalah tentang meningkatnya kehadiran dan pengaruh China terhadap negara-negara di Pasifik. Menurut William Andrew Charles Adie China merupakan *role model* bagi gerakan-gerakan insurjensi lain di dunia.⁵ Sehingga, meningkatnya kehadiran dan pengaruh China di Kawasan Pasifik

⁴ FMI 3-24.2, "Tactics in Counter Insurgency", (Washington D.C.: Headquarters of the Army, 2009), p.2-11.

⁵ William Andrew Charles Adie, "Chinese Strategic Thinking under Mao Tse-tung", (Canberra: Australian National University Press, 1972), p.3.

merupakan masalah bagi Prancis yang sedang melaksanakan operasi kontra insurjensi di Kaledonia Baru. Karena China sebagai *role model* gerakan insurjensi di dunia bisa saja memberikan dukungan (moral, politik, *resources* dan tempat perlindungan) terhadap gerakan insurjensi Suku Kanak di Kaledonia Baru.

Perjanjian Nouméa pada tahun 1998 yang disepakati bersama oleh *Front Libération Nationale de Kanak et Socialiste* (FLNKS) dari pihak Suku Kanak yang pro kemerdekaan dan *Rassemblement Pour la Calédonie dans la République* (RPCR) dari pihak pendatang orang Prancis di Kaledonia Baru yang pro Prancis, serta dari pihak Pemerintah Prancis yang menengahi konflik diantara kedua kubu tersebut, sepakat untuk memberikan kesempatan kepada seluruh penduduk Kaledonia Baru yang memiliki hak pilih guna menentukan nasibnya sendiri dalam referendum tahun 2018, 2020 dan 2022. Pada tanggal 4 November 2018 telah dilaksanakan referendum pertama, dengan hasil kelompok pro kemerdekaan hanya berhasil meraih 43,6% suara, sisanya sebesar 56,4 % suara mendukung Kaledonia Baru tetap bersama Prancis.⁶

⁶ CNN Indonesia, "Referendum Kaledonia Baru, Kelompok Pro Kemerdekaan Kalah", dalam [https://berita/internasional/11-2018/referendum-kaledonia-baru-kelompok-](https://berita/internasional/11-2018/referendum-kaledonia-baru-kelompok-pro-kemerdekaan-kalah/5-november-2018)

Kekalahan tersebut merupakan masalah bagi kelompok insurjen Suku Kanak. Mereka harus mengatur strategi agar dalam pelaksanaan referendum tahun 2020 (tanggal 30 Agustus atau 6 September 2020) dan tahun 2022 nanti Suku Kanak dapat memperoleh suara mayoritas.

Terciptanya perdamaian di Kaledonia Baru pada khususnya dan keamanan regional di Pasifik pada umumnya merupakan kepentingan nasional Prancis dan kepentingan negara-negara lain yang ada di Kawasan Pasifik, termasuk Indonesia. Oleh karena itu, inti permasalahannya adalah bagaimana strategi kontra insurjensi Prancis dapat menggagalkan insurjensi Suku Kanak ketika perkembangan lingkungan strategis regional di Pasifik diwarnai oleh fenomena menguatnya kehadiran dan pengaruh China yang merupakan *role model* bagi seluruh gerakan insurjensi lain di dunia ini. Adapun tujuan penelitian artikel ini adalah untuk mengetahui bagaimana persepsi Prancis tentang ancaman pertahanan keamanan di Pasifik dan untuk mengetahui bagaimana strategi

[pro-kemerdekaan-kalah/5-november-2018](https://berita/internasional/11-2018/referendum-kaledonia-baru-kelompok-pro-kemerdekaan-kalah/5-november-2018), diakses pada 20 Maret 2019.

kontra insurjensi Prancis dalam mengatasi insurjensi di Kaledonia Baru.

Metode Penelitian

Untuk menjawab dua pertanyaan penelitian tersebut di atas, peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Lexy J Moleong, penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian secara holistik (utuh), dengan mendeskripsikan data dalam bentuk kata-kata dan bahasa.⁷ Menurut John W. Creswell, dalam penelitian ilmu sosial dengan menggunakan metode penelitian kualitatif, terdapat beberapa desain penelitian (*strategy of inquiry*), meliputi: Fenomenologi, Etnografi, Studi Kasus, Metode Historis, dan Metode Teori Dasar (*Grounded Theory*).⁸ Adapun desain penelitian yang digunakan dalam penelitian kualitatif ini adalah desain penelitian Studi Kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan *in-depth interview* dan dokumentasi.

⁷ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif (edisi revisi)*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2012), hlm. 6.

⁸ John W. Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 3rd Edition, (Los Angeles: SAGE, 2008), pp.12-13.

Informan dalam penelitian ini: Athan Prancis di Jakarta, Athan RI di Fiji (membawahi Kaledonia Baru sebagai *Area of Observation*), Mantan Athan RI di Australia (Kaledonia Baru sebagai *Area of Responsibility*) dan Pengamat China di Prodi AW di Unhan. Untuk pemeriksaan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber data dan triangulasi teori. Teknik analisis data melalui langkah-langkah: *data collection*, *data condention*, *data display* dan *conclution drawing*.⁹

Hasil dan Pembahasan

Persepsi Prancis tentang Ancaman Pertahanan Keamanan di Pasifik

Konsep ancaman dalam hubungan internasional sifatnya sangat fundamental. Persepsi tentang suatu ancaman sering menjadi *input* yang mendorong tindakan suatu negara ketika berada di panggung dunia. Ancaman itu sendiri bentuknya sangat beragam dan dapat dilihat dalam berbagai konteks. Ancaman bisa berupa pernyataan, kepemilikan rudal antar benua, atau keseluruhan aspek dari suatu negara tertentu. Ancaman dapat terlihat dalam konteks krisis internasional, transisi

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h.252.

kekuasaan, atau bahkan menjadi karakteristik hubungan sehari-hari antara dua negara. Keanekaragaman bentuk ancaman dan kondisi lingkungan strategis yang melatarbelakangi kehadiran ancaman tersebut dapat menggiring pengamat untuk mempercayai bahwa mencari penjelasan tunggal atas terbentuknya suatu ancaman merupakan sesuatu yang keliru. Tetapi *the point of departure* studi tentang ancaman ini seharusnya didasarkan kepada persepsi tentang ancaman itu sendiri. Dalam hal ini beberapa pengamat (atau negara) ketika memandang suatu objek tertentu akan memiliki persepsi bahwa objek tersebut mengandung suatu ancaman, sementara pengamat atau negara lainnya tidak melihat adanya suatu ancaman.

Berbicara tentang ancaman insurjensi Suku Kanak di Kaledonia Baru, ancaman tersebut tidak hanya disebabkan oleh faktor-faktor internal yang berada di dalam wilayah Kaledonia Baru saja, melainkan juga karena adanya faktor eksternal, seperti adanya dukungan dari negara-negara luar atau dari organisasi internasional seperti PBB.¹⁰ Oleh karena itu, untuk

menganalisa strategi kontra insurjensi Prancis di Kaledonia Baru, sebaiknya kita juga memperhatikan bagaimana perkembangan lingkungan strategis regional yang ada di Pasifik.

Adapun fenomena paling menarik dari perkembangan lingkungan strategis di Pasifik, khususnya yang terkait dengan operasi kontra insurjensi Prancis di Kaledonia Baru, adalah fenomena menguatnya kehadiran dan pengaruh China di Pasifik. Hal ini tidak terlepas dari fakta sejarah bahwa perang revolusioner antara Partai Komunis China (PKC) di bawah pimpinan Mao Tse Tung melawan Pemerintahan China oleh Partai Nasionalis Kuomintang di bawah pimpinan Chiang Kai Shek merupakan sebuah *role model* atau referensi bagi gerakan-gerakan insurjensi lain di seluruh dunia.¹¹ Oleh karena itu, penelitian ini akan berupaya mengungkap apakah Prancis yang sedang melaksanakan operasi kontra insurjensi di Kaledonia Baru akan menganggap atau mempersepsikan China sebagai ancaman? Bagaimanakah strategi kontra insurjensi Prancis dalam menghadapi insurjensi Suku Kanak di Kaledonia Baru?

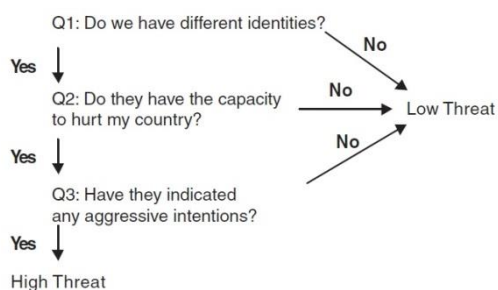
¹⁰ Headquarter Departement of the Army, FMI 3-24.2, 2006 p.2-11.

¹¹ William Andrew Charles Adie, "*Chinese Strategic Thinking under Mao Tse-tung*", (Canberra: Australian National University Press, 1972), p.3.

Dikarenakan kepentingan nasionalnya masing-masing, maka Prancis dan China akhirnya “bertemu” di Pasifik. Berbeda dengan Prancis yang telah hadir di Pasifik sejak abad ke-18, kehadiran China di Pasifik “baru” dirasakan sejak tahun 1980an. Meskipun kehadiran China di Kawasan Pasifik relatif terbilang baru, namun dalam satu dasawarsa terakhir bantuan dana dari China kepada negara-negara di Kawasan Pasifik jumlahnya melampaui jumlah bantuan dana yang telah diberikan oleh Australia dan Selandia Baru yang selama ini dikenal sebagai partner tradisional negara-negara di Kawasan Pasifik.¹²

Dengan menggunakan teori *Threat Assessment Privileging Identity*,¹³ maka menurut analisa peneliti, Prancis akan menganggap China sebagai ancaman, sebagai berikut:

Simple Heuristic for Threat Assessment Privileging Identity



Gambar 1 *Threat Assessment Privileging Identity*

¹² Athan RI di Fiji, Kolonel Inf. Efran Gunawan, 2020.

¹³ David L. Rousseau dan Rocio Garcia-Retamero, “Identity, Power, and Threat Perception”, (SAGE Publications, 2006, p.217)

Sumber: Rousseau, 2016

Menjawab pertanyaan pertama, Prancis dan China jelas memiliki identitas berbeda. Prancis merupakan negara dengan latar belakang kebudayaan latin, seperti Italia, Spanyol, dan Portugis. Sistem pemerintahan di Prancis adalah Republik yang berdasarkan demokrasi liberal. Sedangkan China merupakan negara timur yang banyak dipengaruhi oleh filsafat konfusianisme dengan sistem pemerintahan beraliran faham komunis. Menteri Pertahanan Prancis Florence Parly (2019) menyatakan bahwa “*L’un des défis majeurs à la zone Indopacifique c’est l’affirmation militaire d’un nombre croissant de puissances, établies ou émergentes, pose de nombreux défis au multilatéralisme et renforce l’instabilité et l’imprévisibilité auxquelles nous sommes confrontés*”¹⁴ atau terjemahannya: “Salah satu tantangan utama di Kawasan Indopasifik adalah munculnya kekuatan baru dengan militer yang asertif sehingga kami menghadapi ancaman terhadap multilateralisme (kemajemukan) dan instabilitas dan imprektabilitas yang memperburuk”.

¹⁴ Ministère des Armées, “La France et la Sécurité en Indopacifique”, 2019, p.1.

Meskipun tidak secara eksplisit menyebut China, namun peneliti dapat memahami bahwa yang dimaksudkan dalam pernyataan Menhan Prancis tersebut adalah China. Alasan yang pertama, karena China merupakan salah satu *puissance* atau kekuatan yang *émergente* atau baru muncul dan memiliki *l'affirmation militaire* atau kemampuan militer yang asertif. Alasan yang kedua, bahwa kemunculan China sebagai kekuatan baru menimbulkan masalah terhadap *multilatéralisme* atau prinsip menghormati kemajemukan. Hal ini antara lain dapat dilihat ketika China berinvestasi di suatu negara membantu negara tersebut membangun berbagai fasilitas infrastruktur, maka tenaga kerja yang digunakan untuk mengerjakan proyek-proyek tersebut mayoritas adalah orang China sendiri, termasuk pekerja-pekerja kasarnya. Sehingga China menurut pengamatan peneliti adalah salah satu negara yang mengancam multilateralisme. Fakta dari pernyataan tersebut adalah bagaimana China membantai etnis Uyghur yang mayoritas muslim.

Kemudian menjawab pertanyaan kedua dari teori *Threat Assessment Privileging Identity*, yaitu *Do they have the capacity to hurt my country?* Jawabannya

adalah Yes. China jelas memiliki kapasitas untuk menyerang Prancis. Menurut *Global Fire Power* (2019) kekuatan militer China adalah nomor tiga di dunia setelah Amerika Serikat dan Rusia. Sedangkan kekuatan militer Prancis berada di urutan kelima. Meskipun Prancis juga memiliki kemampuan militer yang cukup baik, tetapi tetap berdasarkan perhitungan dari situs *Global Fire Power*, kemampuan militer China lebih baik dibandingkan dengan kemampuan militer Prancis. Hal yang sama juga disampaikan oleh informan Sesprodi Peperangan Asimetris Unhan, Kolonel Caj Surryanto selaku pengamat China. Menjawab pertanyaan peneliti, beliau mengamati bahwa kemampuan militer China lebih baik dibandingkan dengan kemampuan militer Prancis.

Membandingkan kemampuan militer antar negara memang tidak mudah, dan hal itu tidak juga memberikan gambaran bahwa akan terjadi aneksasi suatu negara oleh negara lainnya. Hal ini dikarenakan berdasarkan piagam PBB yang menjadi dasar hukum internasional, bahwa tidak dibenarkan adanya penggunaan kekuatan militer suatu negara dalam rangka memperluas wilayah kedaulatan negara tersebut dengan merusak

integritas wilayah kedaulatan negara lainnya. Prinsip-Prinsip Hukum Internasional pada tahun 1970 menyatakan bahwa “*The territory of the state shall not be object of acquisition by another state resulting from the threat or use of force. No territorial acquisition resulting from the threat or use of force shall be recognized as legal*” atau terjemahannya “Wilayah suatu negara bukan merupakan objek akuisisi oleh negara lainnya melalui ancaman atau penggunaan kekuatan. Tidak ada wilayah yang diakuisisi menggunakan ancaman dan kekuatan yang akan diakui legalitasnya.” Oleh karena itu, hukum internasional memperbolehkan negara yang diserang terlebih dahulu untuk mempertahankan dirinya.

Kaum realis pun menyatakan bahwa persepsi ancaman dalam konflik antar kelompok disebabkan oleh *power asymmetries* di antara kelompok-kelompok yang ada.

Dan terakhir, menjawab pertanyaan ketiga dari teori *Threat Assessment Privileging Identity*, yaitu *Have they indicated any aggressive Intentions?* Menurut pengamatan peneliti, China telah memperlihatkan niat yang agresif tersebut. China adalah penentang rejim *Freedom of Navigation*

yang dikampanyekan oleh Amerika Serikat dan Prancis, sehingga sering terjadi ketegangan di laut antara negara-negara tersebut. China juga memperlihatkan agresivitasnya dengan menjadi negara pendonor terbesar di Kawasan Pasifik, menggeser *partner* tradisional di kawasan tersebut, yaitu Australia dan Selandia Baru. Jika negara-negara penerima pinjaman tidak mampu mengembalikan dana pinjaman dari China, maka China akan mengambilalih pengelolaan aset-aset strategis yang dimiliki oleh negara-negara itu, contohnya seperti yang terjadi di Srilanka, Djibouti, Pakistan dan Yunani.

Terkait aspek pertahanan keamanan suatu negara, masalah utama yang dihadapi oleh setiap negara adalah bagaimana membangun *power* atau kekuatan untuk menangkal (*to deter*) atau untuk mengalahkan (*to defeat*) atas suatu serangan yang datang. Agar konflik dapat dihindari, maka harus tercipta *balance of power*. Tetapi tidak mudah membedakan kondisi antara *balance of power* dengan *unbalance of power*, sulit diketahui berapa besar *unbalance* atau *gap* kekuatan yang ada dan berapa dekat suatu kondisi *balance of power* telah tercapai. Kekuatan militer (sebagai salah satu kekuatan nasional

suatu bangsa) hanya dapat diuji di dalam peperangan, tetapi jika terjadi peperangan maka *balance of power* telah gagal dalam menjaga pertahanan keamanan. Oleh karena itu, suatu perkiraan tentang *balance of power* yang baik dan ideal adalah manakala ada indikasi bahwa kedua belah pihak atau kedua negara atau blok negara yang saling beroposisi, masing-masing terkena *deterrence effects* dari pihak lawannya sehingga tidak “menguji coba” kekuatan pihak oposisinya dalam peperangan.¹⁵

Terkait pernyataan tersebut di atas, peneliti melihat bahwa kondisi seperti itulah yang kini sedang terjadi di Kawasan Pasifik. Di satu sisi, kehadiran dan pengaruh China terus meningkat, sehingga hal itu bisa menimbulkan persepsi tentang ancaman. Sementara di sisi lain, melalui *La Loi de Programmation Militaire 2019-2025*, atau Undang-Undang Pemrograman Militer 2019-2025, Prancis berusaha menciptakan *balance of power* dengan melakukan modernisasi besar-besaran terhadap sistem alut sista-nya. Apa yang dilakukan oleh Prancis tersebut dapat dipandang sebagai upaya untuk menciptakan *deterrence effects*,

sehingga China tidak menguji coba kemampuan militer Prancis dalam bentuk perang yang sebenarnya.

Sedangkan menurut Johan Galtung, *Conflict* (C) atau konflik dipicu oleh *Behavior* (B) atau perilaku dan *Attitude* (A) atau sikap pihak-pihak yang terlibat di dalamnya.¹⁶ Perilaku China yang sering tidak menghiraukan kaidah hukum internasional, antara lain *the United Nation Convention on the Law of the Sea* (UNCLOS 1982) seperti yang terjadi baru-baru ini di Perairan Laut Natuna Utara, menyebabkan Prancis merasa perlu mengambil sikap tegas dengan memperingatkan China secara terus menerus agar memperhatikan kaidah hukum internasional. Prancis pun merasa perlu melakukan “*close monitoring*” atau “pengawasan secara ketat” terhadap aktivitas China di Pasifik seperti yang disampaikan oleh Colonel Sven Meic, Atase Pertahanan Prancis di Jakarta. Di sisi lain perilaku Prancis yang terus meningkatkan kekuatan militernya melalui Undang-Undang Program Militer 2019 – 2025 tentunya juga akan disikapi oleh China sebagai ancaman terganggunya kepentingan China di

¹⁵ Arnold Wolfers, “*Discord and Collaboration*”, (Baltimore: The Johns Hopkins Press, 1962), pp.133-143.

¹⁶ Johan Galtung, “*Theories of conflict, definitions, dimensions, negations, formation*”, (Hawaii: University of Hawaii, 2009), p.105.

Kawasan Pasifik. Galtung menyatakan bahwa jika sikap dan perilaku pihak-pihak yang terkait mengalami eskalasi, maka besar kemungkinan akan terjadi konflik. Agar konflik dapat dihindari, maka pihak-pihak yang terkait harus saling menyadari terlebih dahulu akan sikap dan persepsi mereka terhadap pihak lainnya serta masing-masing pihak harus menemukan cara mengatasi perilaku negatif untuk meredakan situasi.

Untuk memahami *attitude* dan *behavior* Prancis dan China di Pasifik, menurut Peter T. Coleman, dalam situasi konflik, pemilik kekuatan yang besar dan anggota dari kelompok kekuatan besar sering lalai dalam menganalisa dan cenderung *under estimate* atau menyepelekan pemilik kekuatan yang kecil dan anggota kelompok kekuatan kecil. Selain itu, mereka biasanya berupaya untuk mendominasi *relationship* yang ada, menggunakan taktik menekan, menawarkan sedikit konsesi, memiliki aspirasi yang tinggi dan menggunakan taktik perselisihan. Oleh karena itu kelompok pemilik *power* yang besar akan mempersulit tercapainya kesepakatan yang memuaskan semua pihak dan yang telah dinegosiasikan

sebelumnya.¹⁷ Jika teori Coleman tersebut diterapkan dalam konteks memprediksikan potensi ancaman pertahanan keamanan di Pasifik di masa depan, Prancis yang kekuatan militernya berada di urutan kelima dunia, tidak bisa dipandang sebelah mata oleh China dan China pun tidak dapat bertindak semaunya, apalagi mengganggu kepentingan Prancis. Karena selain sama-sama memiliki kekuatan militer yang hampir setara, perlu diingat pula bahwa kedua negara tersebut merupakan anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang bertugas menjaga keamanan dan perdamaian dunia.

Walaupun hasil kalkulasi dengan menggunakan teori *Threat Assessment Privileging Identity*, teori pertahanan keamanan (*balance of power*) dan teori segitiga konflik menghasilkan perkiraan ancaman yang tinggi, namun Athan Prancis di Jakarta Colonel Sven Meic menyatakan bahwa tidak serta merta Prancis menganggap kehadiran China di Pasifik sebagai ancaman karena Prancis mengakui China sebagai aktor penting, tidak hanya di Kawasan Pasifik, namun juga di dunia. Sehingga Prancis

¹⁷ Morton Deutsch, Peter T. Coleman, Eric C. Marcus, "The Handbook of Conflict Resolution, Theory and Practice, 2nd edition", (San Francisco: Jossey-Bass, 2006), p.120.

menganggap penting sekali mengajak China untuk bekerjasama dalam rangka menjaga stabilitas Kawasan Pasifik yang wilayahnya sangat luas dan bagian terbesarnya adalah perairan dalam. Pengawasan samudera luas tersebut tidak mungkin dapat dilakukan oleh Prancis sendiri tanpa bekerjasama dengan negara-negara lainnya seperti Australia, Selandia Baru, China dan negara-negara *Rim of Pacific*. Pendapat Athan Perancis tersebut juga dapat dilihat melalui kebijakan politik Pemerintah Prancis di bidang ekonomi. Prancis menjalin kerjasama di bidang ekonomi dengan China, yaitu dengan bergabungnya Prancis sebagai negara anggota *Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB)*.¹⁸

Tetapi Colonel Sven Meic pun menyadari akan perlunya dilakukan “close monitoring” atau pengawasan secara terus menerus terhadap China agar mematuhi aturan internasional. Pernyataan tersebut mengisyaratkan bahwa ia sebenarnya mengakui China sebagai negara yang harus diwaspadai oleh Prancis.

¹⁸ Hassane Eddassi, PhD., "Presentation on Asian Infrastructure Investment Bank", Université Paris Dauphine, 2019.

Selain tidak terlalu menganggap meningkatnya kehadiran dan pengaruh China di Kawasan Pasifik sebagai sebuah ancaman, Prancis juga tidak terlalu memandang China sebagai kiblat gerakan insurjensi dunia yang hadir di Pasifik untuk membantu gerakan insurjensi Suku Kanak di Kaledonia Baru. Hal tersebut tercermin dalam pendapat informan Athan Prancis di Jakarta Colonel Sven Meic yang menganggap meningkatnya kehadiran dan pengaruh China di Kawasan Pasifik dalam rangka mengamankan *Sea Lanes Of Communication (SLOC)* dan suplai logistik mereka melalui jalur laut.

Pandangan Colonel Sven Meic tersebut merupakan salah satu alternatif strategi resolusi konflik, yaitu membangun kekuatan kooperatif dengan cara menghilangkan motivasi untuk membangun “power over” atau “kekuatan di atas” dan lebih memilih membangun “power with” atau “kekuatan bersama” pihak lainnya yang ada di Kawasan Pasifik, dalam hal ini China.¹⁹

Alasan lainnya Prancis tidak memandang China sebagai ancaman,

¹⁹ Ericka P. Zimmerman, EdD, ATC dan Valerie Herzog, EdD, LAT, ATC, "Conflict Resolution Strategies and Improving Relationships", (Weber State University, ATT, 2009), p.37.

menurut analisa peneliti, seperti disampaikan oleh informan Athan RI di Fiji Kolonel Inf. Efran Gunawan, bahwa *Gross Domestic Product (GDP)* atau Produk Domestik Bruto (PDB) Kaledonia Baru adalah yang tertinggi di Kawasan Pasifik. *Gross Domestic Product (GDP)* adalah salah satu indikator penting mengukur kesehatan perekonomian suatu negara.²⁰ Tingginya GDP Kaledonia Baru itu mengindikasikan bahwa Prancis telah berhasil menjadikan penduduk Kaledonia Baru sejahtera. Dengan sejahteranya rakyat di Kaledonia Baru, khususnya penduduk asli Suku Kanak, maka hal itu akan semakin memperkuat eksistensi Prancis sebagai pemilik kedaulatan yang syah di Kaledonia Baru. Mayoritas warga negara Prancis di Kaledonia Baru, baik pendatang maupun penduduk asli Suku Kanak diyakini akan menentang setiap aspirasi memisahkan diri dari Prancis dan Kaledonia Baru pun tidak akan terjebak oleh strategi *debt traps* China, seperti yang dialami oleh negara-negara Pasifik lainnya.

Strategi Kontra Insurjensi Prancis di Kaledonia Baru

Secara epistemologi (dasar ilmu pengetahuan), insurjensi di zaman kuno

adalah cara manusia purba mempertahankan hidupnya, yaitu dengan cara *hiding* (bersembunyi) atau *running* (berlari). Sementara itu, secara ontologi (keberadaan) insurjensi adalah karena adanya pihak yang kuat dan pihak yang lemah, atau *power asymmetries*. Sehingga kehidupan awal umat manusia ditandai dengan cara hidup yang berpindah-pindah dan berkelompok-kelompok. Sedangkan secara aksiologi (nilai, tujuan / penggunaan) insurjensi dipicu oleh motivasi mencari kekuasaan atau ingin hidupnya dilayani.

Menurut Martin van Creveld, aktor yang bermain dalam peperangan saat ini bukan lagi *State Actors*, melainkan *Non-State Actor*,²¹ seperti *Front Liberation de Kanak et Socialiste (FLNKS)* di Kaledonia Baru. Strategi yang digunakan adalah strategi peperangan asimetris karena adanya *power asymmetries*. Senjata yang digunakan cenderung bersifat *improvised* atau rakitan. Sedangkan taktik yang digunakan adalah teror, perang psikologis dan serangan ke daerah garis belakang lawan. Dari aspek *trinity of war* (Pemerintah, Militer dan Penduduk), peperangan yang terjadi

²⁰ <https://idtesis.com/pengertian-gross-domestic-product/>, diakses pada 15 Januari 2020.

²¹ Martin Van Creveld, "The Transformation of War: The Most Radical Reinterpretation of Armed Conflict Since Clausewitz", (Free Press, 1991), p.78.

berupaya memberikan efek kepada Penduduk dan Pemerintahan, sedangkan keterlibatan Militer dalam konflik dibuat menjadi semakin tidak relevan.

Sun Tzu mengatakan “Kenali musuhmu, kenali dirimu dan kenali lingkunganmu, maka kamu tidak perlu mengkhawatirkan kesudahan atau akhir dari seribu pertempuran”. Oleh karena itu, kekuatan kontra insurjensi Prancis harus mengetahui gerakan insurjensi seperti apa yang mereka hadapi. Berdasarkan teori insurjensi oleh Alexander Kott dan Bruce Skarin tentang model-model gerakan insurjensi,²² maka gerakan insurjensi yang terjadi di Kaledonia Baru pada awalnya adalah suatu etnik mayoritas yang melawan pemerintahan oleh etnik minoritas atau kekuasaan kolonial. Namun, terhubung dalam perjalanannya, secara demografi Suku Kanak tidak lagi sebagai mayoritas di tanah airnya sendiri, maka insurjensi yang mereka lakukan dapat dikategorikan sebagai minoritas etnik yang menuntut hak yang lebih besar atau kemerdekaan atau suatu gerakan kewilayahan yang menuntut pemisahan diri atau sistem bagi hasil yang lebih

banyak atas eksploitasi sumber daya alam.

Untuk memahami mengapa Suku Kanak menuntut Pemerintah Prancis memberikan kesempatan kepada penduduk asli Suku Kanak menentukan nasibnya sendiri melalui *referendum on self-determination*, hal itu harus dilihat dari aturan hukum internasional. Menurut aturan dalam hukum internasional, ada lima macam cara yang digunakan oleh negara untuk memperluas wilayah daratannya dan memperoleh kedaulatan atas teritori tersebut.²³ Pertama adalah *Terra Nullius* atau “*nobody’s land*”, kedua *Prescription* atau preskripsi, ketiga *Cession* atau cessioni berdasarkan prinsip “*Nemo dat quod non habet*” yang berarti “seseorang tidak memberikan apa yang tidak dimilikinya”, keempat *Accretion* atau akresi, dan kelima *Conquest* atau penaklukan yang merupakan metode yang paling banyak digunakan di masa lampau. Melalui cara kelima inilah (*conquest* atau penaklukan) Prancis menjadi pemilik kedaulatan yang syah di Kaledonia Baru. Hal itu dapat diterima berdasarkan kaidah hukum internasional

²² Alexander Kott dan Bruce Skarin, “*Approaches to Modeling Insurgency*”, (n.d.).

²³ R.Y. Jennings, “*The Acquisition Of Territory In International Law*”, (THE MODERN LAW REVIEW, 1964), pp.113-114.

karena Prancis telah menganeksasi secara resmi Kaledonia Baru pada tanggal 24 September 1853 (sebelum berdirinya PBB).

Tetapi, setelah berdirinya PBB dan pengesahan Piagam PBB, penggunaan kekuatan untuk memperluas wilayah suatu negara tidak lagi dapat diterima sebagai *mode* perluasan wilayah yang valid. Hal tersebut mengacu kepada Pasal 2(4) dari Piagam PBB, yang berbunyi “*All Members shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state, or in any other manner inconsistent with the Purposes of the United Nations*” atau terjemahannya “Dalam hubungan internasional, semua negara anggota harus menahan diri dari penggunaan ancaman atau kekuatan terhadap integritas wilayah atau kemerdekaan politik negara manapun, atau cara-cara lainnya yang tidak sesuai dengan tujuan didirikannya PBB.”

Adapun cara yang dapat ditempuh oleh suatu wilayah yang pernah mengalami kolonisasi di masa lalu untuk dapat menjadi negara yang merdeka terlepas dari negara kolonialnya dan sering dikatakan sebagai cara yang modern adalah melalui referendum atau

pemungutan suara yang merupakan implementasi dari hak menentukan nasib sendiri (*the right to self-determination*) yang diatur dalam hukum internasional. Namun demikian, terkait siapa yang dapat menikmati atau terhadap apa *the right to self-determination* harus ditegakkan, apakah terhadap “orang”, “bangsa” atau “negara”, hal tersebut masih sering menjadi perdebatan di PBB. Oleh karena itu terbuka ruang untuk melakukan lobi di PBB untuk dapat memperoleh legalitas menikmati *the right to self-determination* seperti yang dilakukan oleh perwakilan *Front Libération de Kanak et Socialiste (FLNKS)* di PBB. Sehingga pada tanggal 02 Desember 1986, Sidang Umum PBB melalui Resolusi 41/41A kembali memasukkan Kaledonia Baru dalam daftar wilayah yang akan didekolonisasi. PBB pertama kali memasukkan Kaledonia Baru dalam daftar wilayah yang akan didekolonisasi pada tahun 1946. Setahun kemudian, pada tahun 1947, Prancis memprotes hal itu dengan alasan Kaledonia Baru adalah bagian integral negara Prancis, bukan lagi sebagai koloni.

Selanjutnya, untuk memahami tentang strategi kontra insurjensi Prancis di Kaledonia Baru, terlebih dahulu akan

dikupas pengertian tentang strategi. Menurut teoritikus Amerika Serikat, Arthur F. Lykke Jr. (1989), Strategi sama dengan *ends* (tujuan yang ingin dicapai), ditambah *ways* (cara bertindak) ditambah *means* (instrument atau alat yang digunakan untuk mencapai tujuan).²⁴

Operasi kontra insurjensi Prancis di Kaledonia Baru dilakukan karena adanya insurjensi Suku Kanak sebagai penduduk asli di kepulauan tersebut yang merasa tertindas dan dieksploitasi oleh Pemerintah Kolonial Prancis (*L'exploitation de l'homme par l'homme*). Adapun tujuan yang ingin dicapai Prancis melalui penerapan strategi kontra insurjensi di Kaledonia Baru, menurut Athan Prancis di Jakarta Colonel Sven Meic (2019) adalah untuk “*faire échouer une insurrection*” atau menggagalkan upaya insurjensi Suku Kanak (merdeka dari Prancis) dan untuk “*répondre aux principaux motifs d'insatisfaction*” atau menyelesaikan masalah-masalah yang menyebabkan timbulnya gerakan insurjensi tersebut.

Faktor-faktor yang memicu terjadinya insurjensi Suku Kanak di

Kaledonia Baru antara lain karena adanya *l'exploitation de l'homme par l'homme* atau eksploitasi manusia oleh manusia yang terjadi selama masa kolonial (1853-1946). Alasan berikutnya adalah karena Suku Kanak terpinggirkan secara politik, ekonomi, dan sosial. Dan alasan terakhir, karena tidak diakuinya identitas Kanak (*indigenosity*).

Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan melakukan upaya-upaya untuk menyelesaikan semua permasalahan yang memicu terjadinya insurjensi Suku Kanak adalah untuk “*Gagner le coeur et la pensée de la population en Nouvelle Calédonie*” atau untuk memenangkan hati dan pikiran penduduk Kaledonia Baru (menarik simpati penduduk agar mendukung), bukan untuk penguasaan atas teritori dimana terjadi insurjensi. Jika hati dan pikiran penduduk Kaledonia Baru berhasil direbut, maka secara otomatis dukungan penduduk akan beralih, dari memberikan dukungan kepada kaum insurjen beralih menjadi memberikan dukungan kepada kekuatan kontra insurjensi.

Athan Prancis di Jakarta Colonel Sven Meic (2019) mengatakan bahwa operasi kontra insurjensi Prancis di Kaledonia Baru merupakan “*l'ensemble des mesures civiles et militaires*” atau

²⁴ Arthur F. Lykke Jr., "Military Strategy: Theory and Application", (Carlisle, PA: U.S. Army War College, 1998).

semua tindakan yang dilakukan oleh aparat sipil bekerjasama dengan aparat militer Pemerintah Prancis yang menjadi komponen kekuatan nasional Prancis yang terdiri dari unsur *Military, Information, Diplomacy, Legal, Intelligence, Financial and Economy (MIDLIFE)*. Dengan bekerjasama, masalah-masalah ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan yang memicu terjadinya gerakan insurjensi Suku Kanak tersebut secara perlahan berhasil diselesaikan oleh komponen kekuatan nasional Pemerintah Prancis tersebut, sebagai berikut:

1. Sejak tahun 1946, Kaledonia Baru statusnya bukan lagi sebagai wilayah koloni Prancis, melainkan sebagai *Territoire d’Oûtre Mer (TOM)* atau Wilayah Seberang Lautan Prancis. Suku Kanak diakui sebagai warga negara Prancis. Pada tahun yang sama Prancis juga mencabut pemberlakuan *le code de l’indigénat* atau hukum yang diberlakukan khusus kepada penduduk asli Suku Kanak selama masa kolonial dan bersifat sangat represif serta eksploitatif.
2. Sejak tahun 1957 Suku Kanak diberikan hak politik sehingga bisa

berpartisipasi dalam pemilihan umum (memilih dan dipilih).

3. Identitas Kanak diakui secara resmi oleh Pemerintah Prancis melalui Perjanjian Nouméa tahun 1998 “*Le passé a été le temps de la colonisation. Le présent est le temps du partage, par le rééquilibrage. L’avenir doit être le temps de l’identité, dans un destin commun.*” Terjemahannya “Masa lalu adalah masa kolonialisme. Masa kini adalah saatnya berbagi, melalui keseimbangan. Masa depan harus menjadi masanya bagi identitas (Kanak), dalam kesetaraan nasib.”

4. Sekarang penduduk Kaledonia Baru, termasuk Suku Kanak, bisa menikmati fasilitas rumah sakit gratis, pendidikan gratis, subsidi ekonomi, pemeliharaan dari pemerintah bagi penduduk yang pengangguran dan sebagainya sehingga menjadi negara dengan PDB tertinggi di Kawasan Pasifik.

Keberhasilan kekuatan kontra insurjensi Prancis menggagalkan insurjensi Suku Kanak (merdeka dari Prancis) dan menyelesaikan masalah-masalah yang menjadi pemicu terjadinya gerakan insurjensi tersebut dilakukan

dengan konsep operasi atau *ways*, sebagai berikut:

- a. Ada 3 prinsip utama yang memandu pelaksanaan operasi kontra insurjensi Prancis di Kaledonia Baru, yaitu:

La légitimation de l'action atau legitimasi tindakan, artinya semua kegiatan yang dilakukan dalam operasi kontra intelijen Prancis di Kaledonia Baru harus sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Prancis dan di seluruh Wilayah Seberang Lautan Prancis. Bahkan Prancis pun berupaya mengakomodir desakan PBB agar memberikan hak menentukan nasib sendiri kepada penduduk asli Kaledonia Baru. Tetapi, pelaksanaan referendum tahun 2018, 2020 dan 2022 di Kaledonia Baru dasar hukumnya adalah Perjanjian Nouméa, bukan Resolusi MU PBB 1514 (XV) tanggal 14 Desember 1960 tentang *the Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples* atau Resolusi MU PBB 61/295 tanggal 13 September 2007 tentang *the*

United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples.

l'adaptation au contexte locale atau adaptasi dengan situasi setempat. Bahwa Suku Kanak sebagai penduduk asli di Kaledonia Baru memiliki identitas dan budayanya sendiri yang harus dihormati oleh seluruh komponen kontra insurjensi Prancis. Hukum positif Prancis juga menghormati local wisdom dan hukum adat setempat yang menjadi acuan Suku Kanak dalam konteks kehidupan bermasyarakat di dalam kelompoknya.

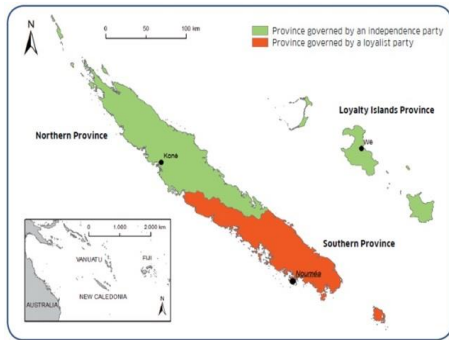
la marginalisation de l'ennemi atau memarginalkan musuh. Prinsip ini merupakan upaya untuk dapat mengontrol kaum insurjen dan penduduk. Hal ini dilakukan untuk menghindari agar penduduk tidak dijadikan sebagai basis pendukung dan perekrutan bagi kaum insurjen, agar tidak ada insurjen yang bersembunyi di antara penduduk dan agar penduduk aman dari tindakan kekerasan kelompok insurjen ketika penduduk memberikan

dukungannya kepada kekuatan kontra insurjensi.

- b. Sebagai prinsip utama, *la légitimation de l'action* atau legitimasi tindakan selalu tercermin dalam setiap upaya menyelesaikan permasalahan yang muncul akibat terjadinya insurjensi Suku Kanak. Contohnya, ketika terjadi insurjensi di front bersenjata pada tahun 1984-1988, untuk meredakan ketegangan situasi pada saat itu, maka diadakan Perjanjian Matignon-Oudinot pada tahun 1988 yang menghasilkan dasar-dasar hukum penyelesaian konflik yang disepakati bersama oleh pihak-pihak yang bertikai.
- c. Penerapan dari prinsip kedua, yaitu *l'adaptation au contexte locale* atau adaptasi dengan situasi setempat, dapat dilihat dalam aspek pemberian hukuman terhadap pimpinan pemberontakan. Pada tahun 1878 Kepala Suku Ataï yang memimpin insurjensi Suku Kanak dihukum oleh kekuatan kontra insurjensi Prancis dengan cara dipenggal kepalanya. Hal yang

sama dialami oleh Kepala Suku Noël yang memimpin insurjensi Suku Kanak tahun 1917.

- d. Perjanjian Matignon-Oudinot pada tahun 1988 menjadi front politik dimana kekuatan kontra insurjensi Prancis di bidang diplomasi berhasil memisahkan penduduk dengan kaum insurjen Suku Kanak. Pembagian tersebut merupakan perwujudan prinsip kontra insurjensi Prancis yang ketiga, yaitu *la marginalisation de l'ennemi* atau memarjinalkan musuh. Pada saat itu disepakati untuk membagi Kaledonia Baru menjadi 3 provinsi berdasarkan konsentrasi etnik dan kecenderungan sikap politik mayoritas penduduknya, yaitu: Provinsi Utara (mayoritas Kanak), Provinsi Selatan (mayoritas kulit putih / Prancis) dan di Kepulauan Setia (mayoritas Kanak), seperti gambar di bawah ini:



Gambar 2 Kaledonia Baru dibagi mjd 3 provinsi

Sumber: Matthias Kowasch, 2016

Jika melihat pembagian Kaledonia Baru menjadi tiga provinsi tersebut secara sepintas, maka kebanyakan orang akan cenderung berkesimpulan bahwa jumlah pendukung pro Prancis lebih sedikit dari jumlah pendukung pro kemerdekaan (Suku Kanak). Tetapi, kesimpulan tersebut salah karena secara demografi 71% penduduk Kaledonia Baru (sebanyak 164.235 jiwa dari 230.789 jiwa total seluruh penduduk Kaledonia Baru pada sensus penduduk di tahun 2004) hidup di Provinsi Selatan, terutama di daerah Nouméa Raya yang dihuni oleh hampir

63% dari total seluruh penduduk di Kaledonia Baru.²⁵

- e. Prinsip *la marginalisation de l'ennemi* atau memarginalkan musuh juga berlaku terhadap negara-negara luar atau organisasi internasional yang memberikan dukungan terhadap insurjensi Suku Kanak di Kaledonia Baru. Berhubung Kaledonia Baru tidak memiliki perbatasan darat dengan negara tetangga, maka tidak ada kaum insurjen Suku Kanak yang membuat kantung-kantung pertahanan sepanjang perbatasan darat dengan negara tetangga yang memberikan dukungan terhadap kelompok insurjen. Kondisi ini menguntungkan kekuatan kontra insurjensi Prancis karena tidak mengalami kesulitan seperti yang dialami oleh kekuatan kontra insurjensi Indonesia di Papua di sepanjang garis perbatasan antara Indonesia dengan Papua New Guinea (PNG).

²⁵ Luc Supera, Eric Baulard, Gérard Baudchon, "L'économie calédonienne en mouvement", (Nouméa: CEROM, 2010), p.13.

f. Prinsip *la marginalisation de l'ennemi* yang diaplikasikan terhadap organisasi internasional yang memberikan dukungan terhadap insurjensi Suku Kanak, dalam hal ini PBB, dapat dilihat ketika Prancis mencegah PBB mengawasi pelaksanaan proses dekolonisasi di Kaledonia Baru melalui referendum *on-self determination*. Hal tersebut antara lain disampaikan oleh H.A. Amankwah yang menulis bahwa “*the Matignon Accords does not provide for a genuine act of self-determination as the United Nations requires. Furthermore, France argues that the United Nations supervision of decolonisation is not necessary because the "issue of independence is now dead and that New Caledonians are determining their own fate through the Matignon process.*”²⁶ Terjemahannya “Perjanjian Matignon tidak memberikan

kesempatan bagi pelaksanaan referendum penentuan nasib sendiri yang tulus seperti yang diserukan oleh PBB. Lebih lanjut, Perancis berargumen bahwa pengawasan PBB terkait proses dekolonisasi tidak diperlukan karena isu kemerdekaan sekarang sudah tidak ada dan penduduk Kaledonia Baru sedang menentukan nasibnya sendiri melalui proses yang disepakati dalam perjanjian Matignon”.

Adapun *means* atau instrumen atau alat yang digunakan oleh Pemerintah Prancis untuk mencapai tujuan operasi kontra insurjensi di Kaledonia Baru meliputi seluruh Sumber Daya Manusia (SDM) Pemerintah Prancis dan Sumber Daya Alam (SDA) serta mineral yang ada di Kaledonia Baru. Sumber Daya Manusia yang terlibat dalam operasi kontra insurjensi di Kaledonia Baru adalah gabungan antara aparat sipil dan personel militer Prancis yang berada di bawah kesatuan *Force Armée en Nouvelle Calédonie* (FANC) dan dibantu personel militer dari kesatuan *Force Armée en Polynésie Française* (FAPF). Mereka merupakan komponen kekuatan

²⁶ H.A. Amankwah, “*Self-determination Asia-Pacific Style: Alien Domination and Freedom's Tortuous Path Revisited*”, (Townsville, Queensland, Australia: James Cook University, 1996), p.137.

nasional Prancis yang terdiri dari unsur *Military, Information, Diplomacy, Legal, Intelligence, Financial and Economy (MIDLIFE)*. Sumber Daya Alam dan mineral yang ada di Kaledonia Baru dieksploitasi dan digunakan untuk kegiatan pembangunan di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya dalam rangka meningkatkan taraf kehidupan penduduk Kaledonia Baru.

Berdasarkan teori efek domino, kekuatan kontra insurjensi Prancis di Kaledonia Baru harus mampu mengalahkan gerakan insurjensi Suku Kanak (keinginan merdeka dari Prancis). Menurut teori tersebut, lepasnya Kaledonia Baru dari Prancis akan diikuti oleh Wilayah Seberang Lautan Prancis lainnya yang menuntut hal yang sama dari Prancis. Hal itu tidak boleh terjadi, karena hubungan internasional antar negara di panggung internasional pada hakikatnya merupakan suatu *struggle for power*, tentang *who gets what, when and how*.

Kesimpulan Rekomendasi dan Pembatasan Persepsi Prancis tentang ancaman pertahanan keamanan di Pasifik

China yang secara historis dikenal sebagai role model bagi gerakan-gerakan insurjensi yang terjadi di seluruh dunia,

tidak dianggap sebagai ancaman oleh Prancis yang sedang melaksanakan operasi kontra insurjensi di Kaledonia Baru. Kehadiran dan pengaruh China yang terus menguat di Pasifik dimanfaatkan oleh Prancis untuk membangun kekuatan kooperatif, yaitu “*power with*” atau “kekuatan bersama” China, bukan “*power over*” atau “kekuatan di atas” kekuatan China. Tetapi Prancis harus melakukan “*close monitoring*” agar China memperhatikan kaidah hukum internasional.

Penggunaan kekuatan untuk memperluas wilayah kedaulatan negara sendiri atau merusak keutuhan wilayah kedaulatan negara lain tidak diperkenankan oleh hukum internasional. Oleh karena itu, satu-satunya akses China ke negara-negara Pasifik adalah melalui pemberian bantuan dana untuk pembangunan berbagai infrastruktur. Strategi China menjadikan bantuan dana tersebut sebagai *debt traps*. Tetapi, sebagai negara dengan PDB tertinggi di Pasifik, Kaledonia Baru tidak akan terjebak dalam perangkap *debt traps* China.

Upaya Prancis lainnya untuk menjaga stabilitas dan perdamaian di Kawasan Pasifik adalah dengan menjaga “*balance of power*” dengan China.

Melalui Undang-Undang Perencanaan Militer 2019-2025, kekuatan dan kemampuan militer Prancis akan dikembangkan dalam rangka menyesuaikan dengan perubahan lingkungan strategis yang membawa perubahan paradigma ancaman, tantangan, gangguan dan hambatan.

Strategi kontra insurjensi Prancis di Kaledonia Baru

Strategi kontra insurjensi Prancis di Kaledonia Baru bertujuan untuk mengalahkan kaum insurjen Suku Kanak dan menyelesaikan semua permasalahan yang menyebabkan terjadinya insurjensi tersebut.

Konsep operasi strategi kontra insurjensi Prancis di Kaledonia Baru berpedoman kepada 3 prinsip, yaitu: *la légitimation de l'action* atau legitimasi tindakan, *l'adaptation au contexte locale* atau adaptasi dengan situasi setempat dan *la marginalisation de l'ennemi* atau memarginalkan musuh. Ketiga prinsip tersebut dilaksanakan menggunakan 3 pendekatan, yaitu dengan *soft power*, *hard power* dan *smart power*.

Sumber daya yang digunakan oleh Prancis dalam operasi kontra insurjen di Kaledonia Baru meliputi Sumber Daya Manusia dari aparat sipil dan militer

Pemerintah Prancis yang merupakan komponen kekuatan nasional Prancis dan terdiri dari unsur *Military, Information, Diplomacy, Legal, Intelligence, Financial* dan *Economy* (MIDLIFE).

Meskipun *referendum on self-determination* masih akan dilaksanakan pada tanggal 30 Agustus atau 6 September 2020 dan pada tahun 2022, tetapi operasi kontra insurjensi Prancis di Kaledonia Baru diperkirakan mampu mengalahkan insurjensi Suku Kanak (keinginan merdeka dari Prancis) dan menyelesaikan masalah-masalah yang menjadi pemicu terjadinya gerakan insurjensi tersebut (Kaledonia Baru dengan PDB tertinggi di Pasifik).

Pemerintah Prancis melalui Athan Prancis di Jakarta segera melakukan implementasi kebijakan *capacity building* dengan negara-negara *rim of Pacific*, antara lain Indonesia, dalam rangka mencegah ancaman insurjensi di Kawasan Pasifik. Hal yang bisa dilaksanakan adalah komitmen untuk tidak memberikan bantuan dalam bentuk apapun terhadap gerakan insurjensi yang terjadi di negaranya masing-masing karena hal itu mutlak permasalahan dalam negeri negara-negara tersebut.

Kementerian dan Lembaga, baik sipil maupun militer, dapat mengikuti strategi kontra insurjensi Prancis di Kaledonia Baru dengan mencegah masuknya Tim Investigasi dari PBB mencampuri penanganan terhadap kelompok insurjen di Papua yang merupakan masalah internal RI. Karena pada hakikatnya, pendirian PBB adalah untuk menyelesaikan *inter-states conflict*.

Daftar Pustaka

Buku

Adie, William Andrew Charles. (1972) *Chinese Strategic Thinking under Mao Tse-tung*. Australian National University Press, 3.

J. Moleong, Lexy. (2012). *Metode Penelitian Kualitatif (edisi revisi)*. PT. Remaja Rosda Karya, 6.

Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Alfabeta, 252.

W. Creswell, John. (2008). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 3rd Edition. SAGE, 12-13.

Galtung, Johan. (2009). *Theories of conflict, definitions, dimensions, negotiations, formation*. University of Hawaii, 105.

Deutsch, Morton, T. Coleman, Peter, C. Marcus, Eric. (2006) *The Handbook of Conflict Resolution, Theory and Practice*, 2nd edition. Jossey-Bass, 120.

Martin Van Creveld (1991), *The Transformation of War: The Most Radical Reinterpretation of Armed Conflict Since Clausewitz*. Free Press, 78.

F. Lykke, Arthur, Jr. (1998). *Military Strategy: Theory and Application*. Carlisle. PA: U.S. Army War College.

L. Rousseau, David dan Garcia-Retamero, Rocio. (2006) *Identity, Power, and Threat Perception*. SAGE Publications, 217.

Wolfers, Arnold. (1962). *Discord and Collaboration*. The Johns Hopkins Press, 133-143.

Kott, Alexander, dan Skarin, Bruce. (n.d.). *Approaches to Modeling Insurgency*.

P. Zimmerman, Ericka, EdD, ATC dan Herzog, Valerie, EdD, LAT, ATC. (2009). *Conflict Resolution Strategies and Improving Relationships*. Weber State University. ATT, 37.

Publikasi

Ministère des Armées. (2019). *La France et la Sécurité en Indopacifique*, 1.

Supera, Luc, Baulard, Eric, Baudchon, Gérard. (2010). *L'économie calédonienne en mouvement*. CEROM, 13.

3-24.2., FMI. (2009). *Tactics in Counter Insurgency*. Headquarters of the Army, 2-11.

Eddassi, Hassane, PhD. (2019) *Presentation on Asian Infrastructure Investment Bank*. Université Paris Dauphine.

Websites

CNN Indonesia. (2018). Retrieved from *Referendum Kaledonia Baru, Kelompok Pro Kemerdekaan Kalah*. <https://berita/internasional/11->

2018/referendum-kaledonia-baru-kelompok-pro-kemerdekaan-kalah, diakses pada 20 Maret 2019.

Idtesis.com. (2020). Retrieved from Pengertian Gross Domestic Product dan Tipe-Tipe, Glosarium. <https://idtesis.com/pengertian-gross-domestic-product/>, diakses pada 15 Januari 2020.

Artikel Jurnal

Jennings, R.Y. (1964). *The Acquisition Of Territory In International Law*. THE MODERN LAW REVIEW, 113-114.

Amankwah, H.A. (1996). *Self-determination Asia-Pacific Style: Alien Domination and Freedom's Tortuous Path Revisited*. James Cook University, 137.

Lampiran

Wawancara dengan Athan Prancis di Jakarta

1. Dengan membandingkan Prancis dan China di Pasifik dalam hal identitas, kekuatan militer dan niat, apakah kehadiran China di Pasifik merupakan ancaman bagi pencapaian kepentingan nasional Prancis di Pasifik? Jika ya, apa strategi Prancis dalam menghadapi hal itu? *En faisant une comparaison entre la France et la Chine en Pacifique selon l'identité, la capacité militaire et l'intention, est-ce que pour La France la présence chinoise en Pacifique menace l'achèvement du but national de l'hexagone? Que fera la France pour l'affronter? By comparing France against China in the Pacific based on identity, military capability and intention, does France consider that the chinese's presence in Pacific will threat the accomplisement of the*

France's national goals? What will France do to face it?

Jawaban :

Pas nécessairement. La Chine est un acteur régional qu'il est important de travailler avec eux, on peut leur inviter à faire une coopération pour maintenir la sécurité et la paix dans la zone Indopacifique. Mais il faut de temps en temps faire du "close monitoring" pour assurer que la Chine respecte les règles internationaux. Surtout, après ce qui est arrivée à la mer de chine méridionale.

Terjemahan :

Semakin menguatnya pengaruh China di Pasifik tidak serta merta mengancam pencapaian tujuan nasional Prancis. China merupakan aktor di kawasan, kami perlu bekerja sama dengan mereka, kami bisa mengajak mereka bekerjasama untuk menjaga keamanan dan perdamaian di kawasan Indopasifik. Tetapi memang perlu dari waktu ke waktu melaksanakan "pengawasan melekat" untuk memastikan agar China mematuhi semua peraturan internasional. Terutama belajar dari pengalaman apa yang terjadi di Laut China Selatan.

2. Menurut Anda, apa tujuan China meningkatkan pengaruhnya di Pasifik?

D'après vous, quels sont les buts de la Chine augmentant ses influences en Pacifique?

In your opinion, what are the purposes of Chinese greater influences in Pacific?

Jawaban :

A mon avis, sécuriser le "Sea Lane Of Communication (SLOC)" c'est ce que la

Chine veut atteindre en fortifiant sa présence en Pacifique. La Chine a aussi besoin de protéger la sécurité de leur supply du logistic.

Terjemahan :

Menurut saya, pengamanan the Sea Lane of Communication (SLOC) merupakan tujuan yang ingin dicapai oleh China dengan memperkuat kehadirannya di Pasifik. China juga berkepentingan untuk menjaga keamanan suplai kebutuhan logistik mereka.

3. Ada kekhawatiran bahwa dana pinjaman dari China akan menyebabkan negara-negara di Pasifik yang menerimanya terjebak dalam perangkap hutang, negara-negara tersebut akan mengalami kesulitan untuk melunasinya sehingga harus melepas aset-aset strategis yang mereka miliki. Bagaimana Anda menanggapi hal ini?

On préviens que l'aide financière de la Chine données aux pays en Pacifique fait partie de la stratégie du "debt trap", dans le futur les pays en Pacifique auront la difficulté pour rembourser la Chine cet argent-là, est-ce que vous êtes d'accord avec cette opinion?

There's a worryness that the fund from the chinese that have been giving to the pacific countries is part of the debt trap strategy, that in the future those countries will have difficulty to repay the loan. What do you think about that?

Jawaban :

Absolument, je suis d'accord avec cette opinion. C'est une forme de colonisation économique. En Europe, la

Grèce a le même problème. Le pays a la difficulté de rembourser l'argent qu'ils avaient emprunté de la Chine il y a des années. Par conséquence, les chinois ont pris alors la gestion du Pirée, c'est un port maritime qui se trouve en Grèce.

Terjemahan :

Sangat jelas, saya setuju dengan pendapat ini. Hal itu merupakan suatu bentuk kolonialisasi secara ekonomi. Di Eropa, Yunani menghadapi masalah yang sama. Negara itu kesulitan mengembalikan hutang yang dipinjamnya dari China beberapa tahun sebelumnya. Akibatnya orang-orang China kemudian mengambil alih pengelolaan Le Pirée, yaitu sebuah pelabuhan maritim yang berada di Yunani.

4. Apa tujuan yang ingin dicapai oleh Prancis melalui penerapan strategi dalam menghadapi ancaman pertahanan keamanan di Pasifik?

Quels sont les buts que la France veut atteindre en appliquant la stratégie pour affronter les menaces de la défense et de la sécurité national en Pacifique?

What are the ends or the objectives of the French Strategy to be obtained facing security threats in the Pacific?

Jawaban :

Pour la France la stabilité de la zone indopacifique est primordiale parce que c'est la source de prospérité globale grâce à son dynamisme économique, sa croissante démographique et sa capacité d'innovation technologique. Toute crise ou conflit dans cette zone serait susceptible de porter gravement atteinte aux intérêts de la France et de

l'Europe. Avec la loi de programmation militaire 2019 – 2025, la France va augmenter la présence de ses forces en Pacifique et partout dans le monde.

Terjemahan :

Bagi Prancis stabilitas keamanan wilayah indopasifik mutlak diperlukan karena merupakan sumber kemakmuran masyarakat dunia yang dipicu oleh dinamika perekonomian, pertumbuhan penduduk dan inovasi teknologi yang terjadi di kawasan tersebut. Segala bentuk krisis atau konflik yang terjadi di wilayah ini dapat mengganggu kepentingan Prancis dan Eropa. Dengan Undang-Undang Perencanaan Militer 2019-2025 Prancis akan meningkatkan kehadiran kekuatannya di Pasifik dan di bagian dunia lainnya.

5. Apa konsep strategi Prancis menghadapi ancaman pertahanan keamanan di Pasifik?

Quels sont les concepts de la stratégie française face aux menaces de la défense et de la sécurité nationale en Pacifique?

What is the ways or the concepts of the French Strategy to be implemented facing security threats in the Pacific?

Jawaban :

Les défis majeur en Pacifique ne peuvent être surmontés que par la voie de coopération parce que la France ne peuvent certainement pas adresser tous ces défis toute seul. La France y entretient en permanence des forces de souveraineté et de présence, pour défendre ses intérêts et contribuer à la stabilité de la région aux côtés de ses partenaires tels que l'Inde, l'Australie, les Etats-Unis, le Japon ou encore la

Malaisie, Singapour, la Nouvelle-Zélande, l'Indonésie et le Vietnam.

Terjemahan :

Tantangan besar yang terjadi di Pasifik hanya bisa diatasi melalui kerjasama karena jelas Prancis tidak akan mampu mengatasinya sendirian. Di kawasan tersebut Prancis mempertahankan keberadaan pasukan penjaga kedaulatan dan untuk memperlihatkan kehadiran Prancis di kawasan, bertujuan untuk membela kepentingan nasional Prancis dan untuk memberikan kontribusinya terhadap pemeliharaan stabilitas di kawasan yang dilakukan bersama-sama dengan negara-negara partner seperti India, Australia, AS, Jepang, Malaysia, Singapura, Selandia Baru, Indonesia dan Vietnam.

6. Bagaimana Anda mendefinisikan insurjensi?

Quelles sont les définitions de l'insurrection d'après vous ?

How do you defines insurgency?

Jawaban :

Les insurrections sont un mouvement organisé visant au renversement d'un gouvernement en place par la subversion et le conflit armé. Ce sont des conflits politico-militaires complexes qui doivent être soigneusement analysés pour être bien compris et neutralisés.

Terjemahan :

Insurjensi merupakan sebuah gerakan terorganisir bertujuan untuk menjatuhkan pemerintahan yang berkuasa melalui subversi dan konflik bersenjata. Konflik yang terjadi tidak hanya bersifat militer semata,

melainkan pula ada nuansa politis yang cukup kompleks di dalamnya. Sehingga diperlukan analisa mendalam untuk dapat memahami dan mentralisir gerakan tersebut.

7. Bagaimana Anda mendefinisikan kontra insurjensi?

Quelles sont les définitions de la contre-insurrection d'après vous ?

How do you defines counter-insurgency?

Jawaban :

En réponse, la contre-insurrection est l'ensemble des mesures civiles et militaires prises pour faire échouer une insurrection et répondre aux principaux motifs d'insatisfaction.

Terjemahan :

Kontra insurjensi merupakan langkah-langkah kerjasama antara sipil dan militer yang diambil dalam rangka mengatasi gerakan insurjensi dan menjawab motif utama ketidakpuasan kelompok insurjen terhadap pemerintah yang berkuasa.

8. Apa Ends atau tujuan yang ingin dicapai oleh Prancis menerapkan strategi kontra insurjensi di Kaledonia Baru?

Quels sont les buts que la France veut atteindre en appliquant la stratégie contre insurrectionnelle en Nouvelle Calédonie?

What are the ends or the objectives of the French's Counter-Insurgency Strategy en Nouvelle Calédonie?

Jawaban :

Le but de l'opération contre-insurrectionnelle française en Nouvelle Calédonie c'est y mettre l'insurrection des autochtones Kanak en échec et répondre aux principaux motifs d'insatisfaction chez les guerriers d'insurrection et leurs supporters.

Terjemahan :

Tujuan operasi kontra insurjensi Prancis di Kaledonia Baru adalah untuk mengalahkan insurjensi penduduk asli Suku Kanak dan menjawab ketidakpuasan kaum insurjen dan pendukungnya terhadap Pemerintah Prancis yang menjadi penyebab utama terjadinya insurjensi.

9. Apa Ways atau konsep strategi kontra insurjensi Prancis untuk memadamkan insurjensi orang Kanak di Kaledonia Baru?

Quels sont les manières ou les concepts d'opération de la stratégie contre-insurrectionnelle française en Nouvelle Calédonie?

What is the ways or the concepts of the French's Strategy of Counter-Insurgency to put out the Kanak insurgency?

Jawaban :

Il y a trois principes dans la doctrine contre-insurrectionnelle française en Nouvelle Calédonie, ce sont: la légitimation de l'action, l'adaptation au contexte locale et la marginalisation de l'ennemi. La guerre de contre-insurrection est avant tout une guerre politique, donc il faut un strict contrôle de la population. Nos trois principes mettent la population au coeur de la stratégie, mais selon des modalités plus actuelles : il s'agit de convaincre et non plus de contraindre. Au niveau

stratégique, la contre-insurrection est reconnue comme une entreprise autant politique que militaire qui doit faire l'objet d'une stratégie intégrale, dirigée par l'Etat menacé.

Terjemahan :

Ada tiga prinsip dalam doktrin kontra insurjensi Prancis di Kaledonia Baru, yaitu: legitimasi tindakan, penyesuaian dengan konteks setempat dan marginalisasi musuh. Esensi dari perang kontra insurjensi adalah perang politik, oleh karena itu diperlukan kontrol yang ketat terhadap penduduk. Tiga prinsip kontra insurjensi kami juga menempatkan penduduk sebagai strategi yang utama, tetapi menurut ketentuan atau cara-cara yang lebih kekinian : itu berarti bagaimana meyakinkan penduduk dan bukan memaksa mereka. Strategi kontra insurjensi melakukan langkah-langkah yang bersifat politis dan militer yang menjadi suatu kesatuan strategi dilaksanakan oleh negara yang terancam oleh gerakan insurjensi yang terjadi.”

10. Apa *Means* atau sumber daya serta sarana yang digunakan oleh Prancis untuk menghadapi gerakan insurjensi oleh FLNKS di Kaledonia Baru?

Quels sont les moyens de la stratégie française face aux menaces d'insurrection en Nouvelle Calédonie?

What is the means of the French Strategy to face security threats in the Pacific?

Jawaban :

Militairement parlant, dans le Pacifique il y a 2,900 soldats français qui font partie des forces de souveraineté en

Nouvelle-Calédonie (FANC) et en Polynésie française (FAPF). Ces forces veillent à la protection et à la sécurité des territoires français ainsi qu'au contrôle des zones économiques exclusives. Elles participes aux opérations de secours aux populations, à la lutte contre les traffics, aux missions de l'action de l'État en mer (AEM) et aux activités de coopération de défense dans tous les domaines.

Les forces de souveraineté en Nouvelle-Calédonie (FANC) et en Polynésie française (FAPF) ont à leur disposition 2 frégates de surveillance dotées chacune d'un hélicoptère, 3 patrouilleurs, 2 bâtiments multi-missions, 5 avions de surveillance maritime, 4 avions de transport tactique et 5 hélicoptères.

Terjemahan :

Terkait sumber daya militer, di Pasifik ada 2.900 tentara Prancis yang disebut sebagai Pasukan Penjaga Kedaulatan di Kaledonia Baru (FANC) dan di Polinesia Prancis (FAPF). Pasukan Prancis tersebut bertugas menjaga dan mengamankan wilayah Prancis, termasuk mengawasi zona ekonomi eksklusif-nya. Pasukan Prancis tersebut juga ikut serta dalam operasi mengamankan warga negara Prancis, perang terhadap penyelundupan, misi tindakan negara di laut (AEM) serta kegiatan kerjasama pertahanan di seluruh domain.

Pasukan Penjaga Kedaulatan di Kaledonia Baru (FANC) dan di Polinesia Prancis (FAPF) diperkuat alutsista berupa 2 fregat pengintai yang dilengkapi dengan 2 helikopter, 3 kapal patroli, 2 kapal multi misi, 5 pesud intai maritim, 4 pesud transportasi taktis dan 5 helikopter.

11. Bagaimana sinergitas civil – militer Prancis dalam operasi kontra insurjensi di Kaledonia Baru “to win the heart and mind of the people” ?

Comment tous les éléments du pouvoir national de la France, soit les civils soit les militaires travaillent conjointement dans l'opération contre-insurrectionnelle en Nouvelle Calédonie afin de gagner le coeur et la pensée de la population là-bas ?

How all elements of France's national power work together in the counter-insurgency operation in New Caledonia to win the heart and mind of the people ?

Jawaban :

Nous, c'est-à-dire les civils et les militaires français travaillons ensemble pour le développement de la Nouvelle Calédonie dans le contexte de répondre aux principaux motifs d'insatisfactions qui a stimulé chez les Kanak pour faire l'insurrection contre la France.

Terjemahan :

Kami, maksudnya aparat sipil dan militer Prancis bekerjasama membangun Kaledonia Baru dalam rangka menjawab atau menyelesaikan permasalahan di sana yang menjadi alasan atau sumber ketidakpuasan utama Suku Kanak sehingga memberontak terhadap Prancis.

12. Salah satu keputusan yang diambil pada Perjanjian Matignon-Oudinot pada tahun 1988 adalah membagi Kaledonia Baru menjadi 3 provinsi, yaitu Provinsi Utara, Provinsi Selatan dan Provinsi Kepulauan Kesetiaan. Pembagian tsb menggambarkan

“voting behavior” dimana orang Kanak mayoritas berada di Provinsi Utara dan Provinsi Kepulauan Kesetiaan, sementara di Provinsi Selatan mayoritas penduduk pro Prancis. Hal ini sejalan dengan teori David Galula, Jacques Hogard dan konsep operasi Kontra Insurjensi Amerika Serikat yaitu perlunya dilakukan pemisahan penduduk sipil dari kaum insurjen. Bagaimana anda menanggapi hal ini?

L'un des résultats de l'accord Matignon-Oudinot en 1988 était de partager la Nouvelle Calédonie en trois provinces en fonction de choix de vote des populations. Ce partage est en accord avec les théories de David Galula, Jacques Hogard et la contre-insurrectionnelle des États-Unis, c'est-à-dire le besoin de séparer la population des gens qui font de l'insurrection. Comment d'après vous sur cela?

One of the results from the Matignon-Oudinot agreement in 1988 was to divide New Caledonia into three separate provinces according to the voting behavior of the population. This division is in line with the theories of David Galula, Jacques Hogard and the US counter-insurgency, that is the necessity to separate the inhabitants from the insurgents. What do you think about that?

Jawaban :

Oui, c'est ça le but principal de partager la Nouvelle Calédonie en trois provinces depuis 1988. Ça fait partie aussi de la troisième principe de notre opération contre-insurrectionnelle “la marginalisation de l'ennemi ou des indépendantistes.”

Terjemahan :

Ya, itu adalah tujuan utama membagi Kaledonia Baru menjadi tiga provinsi sejak tahun 1988. Hal itu juga merupakan bagian dari prinsip operasi kontra insurjensi yang ketiga, yaitu “meminggirkan atau memisahkan musuh atau Suku Kanak yang ingin merdeka dari penduduk Kaledonia Baru lainnya.”

13. Pada tahun 2020 dan 2022 akan dilaksanakan referendum di Kaledonia Baru untuk mengetahui apakah Kaledonia Baru akan tetap bersama Prancis atau merdeka. Bagaimana prediksi Anda tentang hasil akhir referendum itu?

En Nouvelle Calédonie il y aura le référendum en 2020 et 2022 pour décider l'avenir de cet archipel, sois il sera toujours avec la France ou sois être indépendant. Quelle est votre prédiction sur le résultat final de ces référendums?

In New Caledonia there will be referendum in 2020 and 2022 to decide the future of that archipelago, whether it will always be with France or be independent. Can you predict the final result of those referendums?

Jawaban :

Je crois que la Nouvelle Calédonie restera toujours avec la France, mais avec une autonomie plus grande. Le FLNKS ou les Kanaks vont finalement cesser de demander l'indépendance parce que la Nouvelle Calédonie n'est plus une colonie française, mais l'une de ses Territoires d'Oùtre Mer (TOM). Les Kanaks sont français comme les français en Métropole et maintenant ils vivent mieux que leurs ancêtres dans le passé.

Terjemahan :

Menurut saya Kaledonia Baru akan tetap menjadi bagian dari negara Prancis, tetapi dengan otonomi yang lebih besar. FLNKS pada akhirnya akan berhenti menuntut kemerdekaan dari Prancis karena Kaledonia Baru bukan lagi koloni, tetapi salah satu dari Wilayah Seberang Lautan Prancis. Suku Kanak adalah orang Prancis, sama seperti orang Prancis lainnya yang ada di Eropa dan sekarang mereka hidup lebih baik dibandingkan nenek moyangnya di masa lampau.

14. Bagaimana Prancis menanggapi desakan PBB dilakukannya proses dekolonisasi di wilayah-wilayah yang tidak memiliki pemerintahan sendiri?

Comment la France réagit-elle à la demande de l'ONU pour la décolonisation sur les terriroires qui n'ont pas encore leur propre gouvernement?

How does France respond to the UN's call for the decolonisation process in the non-self-governing territories?

Jawaban :

C'est l'affaire intérieur de la France. Tous les pays dans le monde doivent respecter le droit d'auto-détermination des Calédoniens qui est en train de se dérouler dans la paix. Même les Nations unies ne peuvent pas l'intervenir.

Terjemahan :

Hal itu merupakan masalah dalam negeri Prancis. Semua negara di dunia ini harus menghormati hak menentukan nasib sendiri penduduk Kaledonia Baru yang berlangsung dengan damai. Bahkan Perserikatan

Bangsa-Bangsa tidak dapat mengintervensinya.

Dokumentasi wawancara dengan Waasintel Panglima TNI, Mantan Athan RI di Australia (Kaledonia Baru sbg *Area of Responsibility*)

